

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD / Indikator Tujuan Perangkat Daerah
a. Indikator : Indeks Pelayanan Publik

b. Target Kinerja : 75B

c. Realisasi Kinerja : masih proses

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Perangkat Daerah, Program, Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Formulasi Peningkatan Kinerja	Target Periode Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)				Realisasi Kinerja Tahun 2024 Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)	Predikat Capaian Kinerja Tahun 2024 (Tabel TE-1)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)			Kendala/permasalahan yang menghambat Capaian Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Upaya mengatasi kendala/permasalahan				
						K		Rp		K		Rp		K		Rp		K					Rp		K		Rp				K		Rp	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8 x 100%				15	16 = 13			17 = 16/6 x 100%				18	19		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan		Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Hasil Fasilitas dan Koordinasi yang ditindaklanjuti dibagi dengan Jumlah Fasilitas dan Koordinasi dikali 100%	100 %	44,386,885,021	108%	36,339,953,944	100 %	13,458,956,702	26 %	3,356,819,455	26 %	3,282,853,722	52 %	6,636,673,177	52 %	49.33	Sangat Rendah	52 %	6,636,673,177	52.38%	14.96%	adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran kinerja karena Kelurahan menjadi bagian dari Kecamatan Lumajang	Melakukan sosialisasi ke wilayah									
7.01.01	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	Jumlah fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang dipenuhi dibagi jumlah fasilitas operasional perkantoran yang direncanakan dikali 100	100 %	30,318,667,321	96 %	24,180,744,849	100 %	9,203,447,005	20 %	2,418,130,205	19 %	2,428,725,972	38 %	4,846,856,177	38 %	52.66	Sangat Rendah	38 %	4,846,856,177	38	15.99	adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran kinerja karena Kelurahan menjadi bagian dari Kecamatan Lumajang	Koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara rutin/berkala baik secara langsung maupun online									
7.01.01.2.01	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	Jumlah fasilitasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terpenuhi/ Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan	100 %	149,721,000	#%	82,751,250	100 %	20,630,000	0 %	-	6.25 %	2,750,000	7 %	2,750,000	7 %	13.33	Sangat Rendah	7 %	2,750,000	7	1.84	adanya perbedaan persepsi dalam pengukuran kinerja karena Kelurahan menjadi bagian dari Kecamatan Lumajang	Koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara rutin/berkala baik secara langsung maupun online									
7.01.01.2.01.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	6	dokumen	28,540,000	3	dokumen	10,739,000	1	dokumen	2,750,000	-	dokumen	-	1	dokumen	2,750,000	100	dokumen	100	Sangat Tinggi	1	dokumen	2,750,000	17	10	SdH Terealisasi					
7.01.01.2.01.02	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang tersusun	24	dokumen	54,104,500	10	dokumen	45,383,250	8	dokumen	10,880,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	Penetapan SB				
7.01.01.2.01.03	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	39	dokumen	42,572,000	2	dokumen	11,492,000	7	dokumen	7,000,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	Penetapan SB				
7.01.01.2.01.06	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	10	laporan	9,115,000	10	laporan	6,749,500	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan				
7.01.01.2.01.07	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	64	laporan	15,389,500	12	laporan	6,387,500	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan			
7.01.01.2.02	Tepenuhnya fasilitasi administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(Jumlah fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Jumlah Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang harus dipenuhi)*100%	100 %	21,326,580,010	#%	17,303,850,951	100 %	6,738,049,710	50.00 %	1,843,805,651	52.98 %	1,862,075,798	#%	3,705,881,449	103 %	55.00	Sangat Rendah	103 %	3,705,881,449	103	17.38	Adanya efisiensi dalam penganggaran	Memaksimalkan SDM yang ada dengan maksimal									
7.01.01.2.02.01	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	orang/12 bulan	20,336,640,000	62	orang/12 bulan	16,489,264,077	64	orang/12 bulan	6,528,222,710	64	orang/12 bulan	1,789,183,651	64	orang/12 bulan	1,814,770,798	128	orang/12 bulan	3,603,954,449	200	orang/12 bulan	55	Sangat Rendah	128	orang/12 bulan	3,603,954,449	200	17.72	adanya keterlambatan gaji		
7.01.01.2.02.02	Tersusunnya Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	288	dokumen	904,336,010	25	dokumen	766,736,486	96	dokumen	201,300,000	16	dokumen	50,175,000	24	dokumen	46,305,000	40	dokumen	96,480,000	42	dokumen	48	Sangat Rendah	40	dokumen	96,480,000	14	10.67	Penetapan SB		
7.01.01.2.02.03	Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun	2	dokumen	400,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan			
7.01.01.2.02.04	Tersusunnya Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang tersusun	192	dokumen	39,000,000	12	dokumen	19,328,888	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan		
7.01.01.2.02.05	Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	24	laporan	40,338,000	15	laporan	25,980,500	8	laporan	8,527,000	4	dokumen	4,447,000	1	dokumen	1,000,000	5	dokumen	5,447,000	63	dokumen	64	Rendah	5	dokumen	5,447,000	21	13.50	Penetapan SB		
7.01.01.2.02.06	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Tanggapan Pemantauan dan Tindak Lanjut Pemantauan	Pengembangan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemantauan dan Tindak Lanjut Pemantauan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemantauan dan Tindak Lanjut Pemantauan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemantauan dan Tindak Lanjut Pemantauan	2	dokumen	350,000	2	dokumen	740,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan		
7.01.01.2.02.07	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tersusun	48	laporan	4,828,000	12	laporan	1,800,000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan		
7.01.01.2.02.08	Tersusunnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	4	dokumen	688,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan		
7.01.01.2.03	Tepenuhnya fasilitasi administrasi barang Milik Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	(Jumlah fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang terpenuhi/ Jumlah Fasilitas Fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah yang harus dipenuhi)* 100%	100 %	87,709,000	#%	72,444,000	100 %	583,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	Masih belum terintegrasi untuk pelaporan/ pencatatan aset/ barang Kecamatan dan Kelurahan	Koordinasi dan evaluasi dilaksanakan secara rutin/berkala baik secara langsung maupun online		
7.01.01.2.03.01	Tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD dan KSNBMD Perubahan yang tersusun	32	dokumen	33,259,000	2	dokumen	4,698,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan		
7.01.01.2.03.05	Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	68	laporan	33,156,000	2	laporan	4,434,000	4	laporan	583,000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak dianggarkan		

7.01.03.2.06.12	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Kelarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Kelarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelarga Berkualitas	Jumlah Kelarga yang Mengikuti Kesadaran Kelarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelarga Berkualitas	Jumlah Kelarga yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kesadaran Kelarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Kelarga Berkualitas	17,568	kelarga	491,515,000	8	kelarga	138,414,950	5,856	kelarga	147,756,000	960	kelarga	37,851,000	960	kelarga	33,675,000	###	kelarga	71,526,000	33	kelarga	48.41	Sangat Rendah	1,920	kelarga	71,526,000	11	14.55	Persiapan SB			
7.01.04	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi Keteteraman dan Keterlibatan Umum	PROGRAM KOORDINASI KETETERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Keteteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Keteteraman dan Keterlibatan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Koordinasi Keteteraman dan Keterlibatan Umum yang direncanakan x 100 %	100	%	512,990,000	50	%	256,325,000	100	%	151,010,000	50	%	96,540,000	50	%	11,200,000	###	%	107,740,000	100	%	71.35	Rendah	100	%	107,740,000	100	21.00	Adanya SB dan refookuing anggaran	Melaksanakan kegiatan secara prioritas		
7.01.04.2.01	Terlaksananya Fasilitas Koordinasi upaya penyelenggaraan Keteteraman dan Keterlibatan Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteteraman dan Keterlibatan Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya dan Keterlibatan Umum	Jumlah Fasilitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Keteteraman dan Keterlibatan Umum	6	fasilitas	512,990,000	4	fasilitas	239,910,000	2	fasilitas	151,010,000	1	fasilitas	96,540,000	1	fasilitas	11,200,000	2	fasilitas	107,740,000	100	fasilitas	71.35	Rendah	2	fasilitas	107,740,000	33	21.00	Adanya SB dan refookuing anggaran	Melaksanakan kegiatan secara prioritas		
7.01.04.2.01.01	Tersusunnya Laporan Hasil Sirengtas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sirengtas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sirengtas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sirengtas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tertara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	280	laporan	496,190,000	2	laporan	73,260,000	94	laporan	145,610,000	16	laporan	96,540,000	24	laporan	11,200,000	40	laporan	107,740,000	43	laporan	73.99	Sangat Rendah	40	laporan	107,740,000	14	21.71	Persiapan SB			
7.01.04.2.01.02	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang disusun	6	laporan	16,800,000	6	laporan	166,650,000	2	laporan	5,400,000	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	-	laporan	-	Sangat Rendah	-	laporan	-	-	-	Persiapan SB			
7.01.05	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan dibagi Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan x 100 %	100	%	25,575,000	##	%	21,825,000	100	%	8,325,000	100	%	1,800,000	100	%	1,800,000	##	%	3,600,000	100	%	43.24	Sangat Rendah	100	%	3,600,000	100	14.08	Adanya SB dan refookuing anggaran	Melaksanakan kegiatan secara prioritas		
7.01.05.2.01	Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3	fasilitas	25,575,000	2	fasilitas	21,825,000	1	fasilitas	8,325,000	1	fasilitas	1,800,000	1	fasilitas	1,800,000	1	fasilitas	3,600,000	100	fasilitas	43.24	Sangat Rendah	1	fasilitas	3,600,000	33	14.08	Adanya SB dan refookuing anggaran	Melaksanakan kegiatan secara prioritas		
7.01.05.2.01.08	Tersusunnya Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	36	dokumen	25,575,000	2	dokumen	21,825,000	12	dokumen	8,325,000	3	dokumen	1,800,000	3	dokumen	1,800,000	6	dokumen	3,600,000	50	dokume	43.24	Sangat Rendah	6	dokumen	3,600,000	1	14.08	Persiapan SB			
	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata-Rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Jumlah Desa yang menyusun RKPD desa tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun APBDes tepat waktu + Jumlah Desa yang menyusun LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan x 3 Dokumen administrasi pemerintahan desa x 100%	100	%	22,800,000	100	%	284,500,000	100	%	8,100,000	33	%	600,000	-	%	-	-	-	-	600,000	33	%	26	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	8	Kurang nya tenaga ahli dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana /bangunan fisik di Desa	Sering mengadakan monev ke Desa
7.01.06	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100	%	-	100	%	-	100	%	-	-	%	-	-	%	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	-	%	-	-	-	-	8	Masih kurang kooperatifnya Perangkat Desa dengan Kecamatan	Sering mengadakan monev ke Desa
			Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan APBDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100	%	22,800,000	100	%	284,500,000	100	%	8,100,000	-	%	600,000	-	%	-	-	-	600,000	-	%	26.30	Sangat Rendah	-	%	600,000	-	-	-	7.98	Kurang nya tenaga ahli dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana /bangunan fisik di Desa	Sering mengadakan monev ke Desa
			Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	Jumlah desa yang menetapkan LPPDes tepat waktu dibagi Jumlah desa x 100 %	100	%	-	100	%	-	100	%	100	-	%	-	-	%	-	-	-	-	-	%	-	Sangat Rendah	-	%	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01	Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dibagi Jumlah Persentase Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang direncanakan x 100%	100	%	22,800,000	5	desa	284,500,000	100	%	8,100,000	-	%	600,000	-	%	-	-	-	-	600,000	-	%	7.41	Sangat Rendah	-	%	600,000	-	-	2.63	-	-
7.01.06.2.01.01	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12	dokumen	2,700,000	5	desa	-	4	dokumen	900,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	-	dokumen	-	-	-	-	-	Persiapan SB
7.01.06.2.01.02	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	15	dokumen	5,850,000	5	desa	-	5	dokumen	1,800,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	-	dokumen	-	-	-	-	-	Persiapan SB
7.01.06.2.01.03	Tersusunnya Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	dokumen	-	15	dokumen	255,600,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	-	dokumen	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.06	Tersusunnya Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5	dokumen	3,425,000	1	dokumen	28,900,000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.06.2.01.08	Tersusunnya Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2	dokumen	10,825,000	1	laporan	5,400,000	-	laporan	600,000	-	laporan	-	-	laporan	600,000	-	laporan	-	-	-	-	-	Sangat Rendah	-	laporan	600,000	-	5.54	Persiapan SB		
	TOTAL						44,409,685,021	##	%	36,624,453,944			13,467,056,702			3,360,169,455					3,360,169,455			24.95	Sangat Rendah			3,360,169,455		7.57					
													d. Rata-rata capaian kinerja (%)													50.24 %									
													e. Predikat kinerja													Sangat Rendah									

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:

f. Indikator Tujuan : - Tetap memberikan pelayanan yang maksimal dengan memperhatikan atau memahami alasan masyarakat melakukan pengurusan adminduk melalui calo
- Kerjasama yang baik dalam memberikan pengertian secara lisan (saat melaksanakan rakor) ataupun online kepada setiap masyarakat dalam pentingnya dokumen adminduk
- Memaksimalkan pemeliharaan dengan menerapkan skala prioritas
- Koordinasi yang baik antara masyarakat, dan pemberi jasa pelayanan (Kecamatan, Dinas Sosial, dan PT POS Indonesia)

g. Indikator Sasaran : - Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan, TPD /Korcam dan Perangkat Desa
- Kerjasama yang baik dari masing masing personel di Kecamatan Lumajang
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan, dan Kelurahan
- Koordinasi yang baik oleh tim Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

h. Indikator Tujuan : - Masih adanya biro jasa pengurusan adminduk di Kecamatan (calo)
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen adminduk
- Sarana prasarana Kecamatan yang masih belum optimal
- Birokrasi yang terlalu panjang dan terkesan berbelit (khususnya pada pencarian santunan kematian)

L.	Indikator Sasaran	- Masih terbatasnya SDM Desa yang menguasai bidang administrasi Desa khususnya pembangunan fisik - Masih kurangnya SDM pada seksi Pemberdayaan Masyarakat - Masih belum kooperatif nya Kepala Desa dan Perangkat dalam pelaporan admnistirasi desa khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB) - Masih belum adanya integrasi pada pelaporan aset dan keuangan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan (masih perekapan secara manual) - Masih ada desa yang harus selalu diberikan peringatan untuk segera melaksanakan pelaporan administrasi Desa secara tepat waktu
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*); Meningkatkan upaya penyerapan anggaran sesuai Time Schedule yang sudah di tentukan		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*); Camat melalui Korcam dan TPD untuk selalu mengingatkan dan memberikan deadline kepada setiap Desa dalam masa pelaporan administrasi Desa		

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

PETUNJUK PENGISIAN :

- a. Diisi dengan indikator Tujuan Perangkat Daerah
 - b. Diisi dengan target indikator tujuan perangkat Daerah Tahun berjalan
 - c. Diisi dengan realisasi indikator tujuan Perangkat Daerah Tahun berjalan
 - d. Diisi dengan penjelasan faktor-faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator Tujuan Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
 - e. Diisi dengan penjelasan faktor-faktor pendorong keberhasilan tercapainya indikator Sasaran Perangkat Daerah pada tahun berjalan
 - f. Diisi dengan penjelasan faktor-faktor penghambat keberhasilan tercapainya indikator Tujuan Perangkat Daerah pada tahun berjalan
 - g. Diisi dengan penjelasan faktor-faktor penghambat keberhasilan tercapainya indikator Sasaran Perangkat Daerah pada tahun berjalan (Perkembangan setiap Triwulan sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir)
- Kolom 1** : diisi dengan nomor urut program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas sesuai dengan yang tercantum dalam Renja Perangkat Daerah
- Kolom 2** : diisi dengan sasaran pelayanan Perangkat Daerah pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam Renja Perangkat Daerah
- Kolom 3** : diisi dengan uraian program/kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan Renja Perangkat Daerah
- Kolom 4** : diisi Jenis indikator kinerja program (outcome)/kegiatan/sub kegiatan (output) sesuai dengan yang tercantum pada Renja Perangkat Daerah
- Kolom 5** : diisi Formulasi atau rumus perhitungan indikator Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- Kolom 6** : diisi jumlah/besaran target kinerja (K) dan anggaran indikatif (Rp) yang tercantum dalam matriks TC 27 kolom akhir periode Renstra Perangkat Daerah
- Kolom 7** : diisi jumlah/besaran realisasi kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) yang telah dicapai mulai dari tahun pertama Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun n-2
- Kolom 8** : diisi jumlah/besaran target kinerja (K) dan Jumlah anggaran (Rp) yang bersumber dari Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (n-1) yang sudah disepakati dalam APBD Kabupaten
- Kolom 9** : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan I untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
- Kolom 10** : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan II untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
- Kolom 11** : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan III untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
- Kolom 12** : diisi dengan realisasi capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) pada triwulan IV untuk Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
- Kolom 13** : diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja (K) dan realisasi anggaran (Rp) mulai dari triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun berjalan (n-1)
- Kolom 14** : diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renja Perangkat Daerah pada tahun berjalan, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
- Kolom 15** : diisi Skala nilai Peningkat Kinerja yang dicapai pada Tahun berkenaan berdasarkan data tabel T-E 1
- Kolom 16** : diisi dengan realisasi kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) tahun berjalan
- Kolom 17** : diisi dengan rasio antara realisasi dan target Renstra Perangkat Daerah tahun berjalan, baik pada capaian kinerja (K) maupun penyerapan anggaran (Rp)
- Kolom 18** : diisi dengan Kendala/Permasalahan yang menghambat Capaian Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan termasuk penjelasan terhadap kinerja yang tidak tercapai/melebihi capaian
- Kolom 19** : diisi dengan Upaya mengatasi kendala/permasalahan Capaian Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- Kolom 20** : diisi nama Perangkat Daerah, Nama Bidang, Nama Seksi, Nama Bagian yang bertanggungjawab dan melaksanakan Renja Perangkat daerah yang dievaluasi

Lumajang, tanggal 19 April 2024
CAMAT LUMAJANG

DRS. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP. 19701218 199101 1 002

Nama Bagian, Perangkat Daerah Penanggungjawab
20
Kecamatan Lumajang
Camat
Sekcam
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Sekcam
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Kasubag Keuangan
Sekcam
Sekcam
Kasubag Umum Kepegawaian

Kasubag Umum Kepegawaian
Sekcam
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Sekcam
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Sekcam
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Sekcam
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Sekcam
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Kasubag Umum Kepegawaian
Camat
Kasi Yansum
Kasi Pebyanan

Camat

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Lurah

Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Lurah

